

**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan perencanaan penelitian pengembangan pembangunan daerah, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rencana Strategis (Renstra) secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Renja, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024. Dokumen

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPD dan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow serta Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, dengan melihat kondisi terkini evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2022.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 - j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 - l. Peraturan Bupati nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - m. Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - o. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah guna merumuskan program dan kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD,

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 (n-1) serta pencapaian tahun berjalan tahun 2022 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2023 (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM, dan SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkat pelayanan perangkat daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Bagian ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini dikeemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya program dan kegiatan, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah - kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2021 (n-1), serta pencapaian tahun berjalan tahun 2022 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n+1).

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pada Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow menerima anggaran sebesar Rp. 10.222.230.935 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program 9 Kegiatan dan 24 Sub. Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.230.698.908 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 80,51% dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%, Penjelasan yang lebih rinci mengenai realisasi kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2022

JENIS BELANJA		TAHUN 2022			KET
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Belanja Operasi Tahun 2022		10.222.230.935,00	8,230.698.908,00	80,51	
Belanja Pegawai		6.132.649.429,00	5.838.697.487	95,20	
Belanja Barang dan jasa		3.462.355.020,00	2.078.240.951,00	60,02	
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya		458.026.486,00	244.755.970,00	75,27	
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		169.200.000,00	69.004.500,00	40,78	
No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	8.784.220.632,00	7.764.689.521,00	88,39	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.087.409.429,00	5.793.457.487,00	95,17	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.069.838.097,00	681.021.177,00	63,66	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.964.210,00	552.415.976,00	89,97	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	627.226.486,00	413.760.470,00	65,96	
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.900.000,00	191.436.250,00	93,42	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.642.410,00	87.358.161,00	64,40	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.489.569.560,00	1.846.644.543,00	74,18	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.480.002.500,00	1.836.842.543,00	74,06	

	2	Penyelenggaraan Pengawasan Tertentu	9.567.000	9.400.000	98.25	
3		Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	41.457.620	15.500.000	37.39	
	1	Pendampingan dan Asistensi	41.457.620	15.500.000	37.39	
TOTAL			10.222.230.935,00	8.230.698.989,00	80,52	

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 didasarkan pada Renstra Inspektorat Daerah tahun 2023-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
		Indikator	Target	Realisasi	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tata Kelola Kesekretarlatan	95	88,06	92,69
I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)	12	12	100
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	100
II.	Administrasi Kepegawajan Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan Aparatur (%)	100	100	100
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	20	20	100
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	12	100
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Buah)	12	12	100
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor (Jumlah/Jenis)	21	21	100
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Jenis)	8	10	125
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	100
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang yang Disediakan Makan Minum (Laporan)	4	4	100
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Laporan)	12	12	100
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Kinerja Aparatur (Unit)	141	139	99
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	120	120	100
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang diadakan	20	18	90
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	12	100
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat-menyurat (Lembar)	1400	1400	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	12	12	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	100

NO	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
		Indikator	Target	Realisasi	%
IV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	93,7	93,7
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	100
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	20	99
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100
B.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan	91%	91%	100
I.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Entitas yang dilaksanakan pengawasan / pemeriksaan internal	275	275	100
1.	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Entitas yang dilaksanakan pengawasan / pemeriksaan internal	275	275	100
2.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	12	100
II.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah perangkat Daerah yang bebas temuan berdasarkan LHP BPK	91	75	82
1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	2	100
C.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5	100
I.	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	21	21	100
1.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	4	100

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasi anggaran belum memenuhi target sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun OPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Tabel 2.3. T – C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	Perencanaan									
02.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan	85	85	95	88,06	92,69	100%	-	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)	12	12	12	12	100	12	-	-
01 1.02 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	-	-
01 1.02 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	-	-	12	12	100	12	-	-
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan Aparatur (%)	-	-	100	100	100	100	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	20	20	100	20	-	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	-	-	12	12	100	12	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Buah)	-	-	12	12	100	12	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	4	4	100	4	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Jenis)	-	-	8	10	125	10	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	4	4	100	4	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	4	4	100	4	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12	12	100	12	-	-
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Kinerja Aparatur (Unit)	-	-	20	20	100	20	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	120	120	100		-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	20	18	90	10	-	-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	-	-	12	12	100	12	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat-menyurat (Lembar)	-	-	1400	1400	100	1400	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	-	12	12	100	12	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	12	12	100	12	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)	-	-	100	93,7	93,7	100	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	-	6	6	100	6	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	21	20	99	21	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	1	1	100	1	-	-
	Program Penyelenggaraan pengawasan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	91%	91%	100%	100%	-	-
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Entitas yang dilaksanakan pengawasan / pemeriksaan internal	-	-	275	275	100	275	-	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Entitas yang dilaksanakan pengawasan / pemeriksaan internal	-	-	275	275	100	275	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	12	12	100	12	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2021	Realisasi Kinerja renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase jumlah perangkat Daerah yang bebas temuan berdasarkan LHP BPK	-	-	91	75	82		-	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	-	-	2	2	100	2	-	-
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5	5	100		-	-
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	-	-	21	21	100	21	-	-
	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	4	4	100	1	-	-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan PD menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow	-	-	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP	-	-	-
2	Persentase tindak lanjut LHP Instansi pemeriksa	-	-	80	95	-	-	75	77,51	-	-	-
3	Persentase Auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya keahliannya	--		87.5	-	-	-	90	-	-	-	-
4	Level Maturitas SPIP Terintegritas	-	-	-	-	2.4	3	-	-	3	3	-
5	Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	-	-	-	-	2.4	3	-	-	3	3	-

Berdasarkan tabel diatas, ada perubahan indikator dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023-2024. Hal ini sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 yakni dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota melalui pemilih serentak Nasional pada tahun 2024.

Sehingga Adanya aturan ini menggambarkan bahwa daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2024 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Sehingga disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas dan tantangan berat dimasa datang. Institusi yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan interen harus senantiasa sigap dan mampu membaca perubahan yang terjadi di daerah. Sementara sumber daya yang ada di lingkungan Inspektorat Bolaang Mongondow yang terdiri atas pejabat struktural, fungsional dan non fungsional baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pengawasan secara optimal. Hal tersebut diatas berimplikasi pada sejumlah permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Belum terpenuhinya tenaga auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah;
2. Belum terlaksana secara optimal pengembangan kompetensi, jenjang karir dan pelatihan;
3. Belum sepenuhnya SPIP diimplementasikan pada perangkat daerah;
4. Rendahnya Kapabilitas APIP;
5. Beban Kerja Inspektorat Daerah yang cukup banyak berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal
7. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
8. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan asistensi pendampingan dan fasilitasi
9. Perangkat Daerah kurang pro aktif terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah di masa yang akan datang serta untuk menghadapi dinamika yang terjadi saat ini, maka melalui Analisa SWOT, hal-hal yang harus dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kedepan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Aparat Pengawas dan P2UPD ;
2. Peningkatan fasilitasi terhadap OPD dalam proses Pengawasan;
3. Selalu *up to date* terhadap data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru supaya selalu tanggap dan dapat menangkap kebutuhan zaman ;
4. Mendorong pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang Pengawasan;
5. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kepala OPD dalam melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan Baik internal maupun eksternal;
6. Mengoptimalkan penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan dan penambahan kegiatan untuk rencana kerja tahun berikutnya.

Dari tinjauan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut Indikator target kinerja, target capaian, pagu indikatif, dan kebutuhan dana yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5. T.C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Inspektorat Daerah	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	9.900.843.765	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Inspektorat Daerah	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	9.900.843.765
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)	12 Bulan	5.889.105.498	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)	12 Bulan	5.889.105.498
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 bln	5.843.865.498	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 bln	5.843.865.498
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bln	45.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bln	45.240.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Dokumen	1.832.256.002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Dokumen	1.832.256.002
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	40 Orang	1.744.566.002	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	40 Orang	1.744.566.002
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	695.448.832	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	695.448.832
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Inspektorat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	2 Paket	38.691.669	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Inspektorat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	2 Paket	38.691.669

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.879.523	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.879.523
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4 Dokumen	14.950.881	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4 Dokumen	14.950.881
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	59.619.841	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	59.619.841
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	562.306.918	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	562.306.918
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Kinerja Aparatur (Unit)	49 unit	1.064.490.555	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Kinerja Aparatur (Unit)	49 unit	1.064.490.555
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 unit	499.223.055	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 unit	499.223.055
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 unit	565.267.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 unit	565.267.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Waktu Penyediaan Dokumen Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12 Bulan	229.831.872	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Waktu Penyediaan Dokumen Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	12 Bulan	229.831.872
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	40.831.872	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	40.831.872
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	189.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	189.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100%	189.711.006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100%	189.711.006

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 unit	174.654.896	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 unit	174.654.896
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21 unit	15.056.110	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21 unit	15.056.110
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 persen	3.692.887.431	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90 persen	3.692.887.431
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pendanaan dan evaluasi	453 Dokumen	3.191.600.105	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pendanaan dan evaluasi	453 Dokumen	3.191.600.105
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 LHP	666.450.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 LHP	666.450.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55 LHP	219.200.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55 LHP	219.200.000
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	89 LHR	482.100.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	89 LHR	482.100.000
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	49 LHR	205.212.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	49 LHR	205.212.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	70 Kesepakatan	1.307.116.281	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	70 Kesepakatan	1.307.116.281

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	170 Dokumen	311.521.824	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	170 Dokumen	311.521.824
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	80 %	501.287.326	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	80 %	501.287.326
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	168.811.326	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	168.811.326
	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	332.47600	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	332.47600
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	408.606.432	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	408.606.432
	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah	Jumlah pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	408.606.432	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah	Jumlah pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	408.606.432
	Koordinasi monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	408.606.432	Koordinasi monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	408.606.432

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi baik dari hasil penelaahan prioritas pembangunan daerah, dan isu-isu strategis (teknokratis), yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD. Berdasarkan musrenbang (partisipatif) tidak ada usulan yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
-	-	-	-	-	-
NIHIL					
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023: PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	
Prioritas Nasional	
PRIORITAS 1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PRIORITAS 2	Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan)
PRIORITAS 3	Penanggulangan Pengangguran disertai dengan peningkatan Decent Job
PRIORITAS 4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
PRIORITAS 5	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
PRIORITAS 6	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)
PRIORITAS 7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain: Air Bersih dan Sanitasi
PRIORITAS 8	Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Adapun kebijakan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023: “Revitalisasi daya saing melalui penguatan infrastruktur dan sumberdaya manusia serta kualitas lingkungan hidup”.	
Prioritas Daerah	
PRIORITAS 1	Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
PRIORITAS 2	Peningkatan kualitas Pendidikan
PRIORITAS 3	Peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintahan
PRIORITAS 4	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN
PRIORITAS 5	Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak
PRIORITAS 6	Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
PRIORITAS 7	Pemetaan potensi invesstasi dan promosi
PRIORITAS 8	Penguatan koperasi, UMKM dan industri pengolahan
PRIORITAS 9	Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah tahun 2024, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mendukung secara tidak langsung prioritas Pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

Sehingga dukungan Inspektorat Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan daerah tahun 2024 adalah bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan, memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, seperti yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<p>Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik</p> <p>Nilai Maturitas SPIP Terintegritas</p> <p>Nilai Maturitas Kapabilitas APIP</p>	<p>77,5</p> <p>3</p> <p>3</p>

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh

masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan **money follows program** dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). RKPD ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah tahun 2024 sebagaimana terjabarkan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.4 T-C. 33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
6	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6 01	INSPEKTORAT DAERAH												14.002.337.628			14.002.337.628	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9.900.843.765			9.900.843.765	
6 01 01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												5.889.105.498			5.889.105.498
6 01 01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90 Persen	44 Orang / bulan	90 Persen	5.843.865.498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	5.843.865.498	
6 01 01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90 Persen	12 Dokumen	90 Persen	45.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	45.240.000	
5 01 01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												1.832.256.002			1.832.256.002
6 01 01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 Persen	2 Paket	90 Persen	87.690.000	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	87.690.000	
6 01 01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 Persen	40 Orang	90 Persen	1.744.566.002	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	1.744.566.002	
6 01 01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												695.448.832			695.448.832
6 01 01	2,06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	2 Paket	90 Persen	38.691.669	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	38.691.669	

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	4 Paket	90 Persen	19.879.523	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	19.879.523
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	4 Dokumen	90 Persen	14.950.881	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	14.950.881
6	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	4 laporan	90 Persen	59.619.841	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	59.619.841
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	12 laporan	90 Persen	562.306.918	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	562.306.918
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.064.490.555					1.064.490.555	
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		90 Persen	46 unit	90 Persen	499.223.055	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	499.223.055
6	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Persentase Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		90 Persen	3 unit	90 Persen	565.267.500	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	565.267.500
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							229.831.872					229.831.872	

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	12 bulan	90 Persen	40.831.872	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	40.831.872
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	12 Bulan	90 Persen	189.000.000	Pendapatan Asli Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	189.000.000
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							189.711.006				189.711.006		
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	6 unit	90 Persen	174.654.896	Pendapatan Bagi Hasil		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	174.654.896
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	21 unit	90 Persen	15.056.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	15.056.110
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan							3.692.887.431				3.692.887.431		
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							3.191.600.105				3.191.600.105		
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	20 LHP	90 Persen	666.450.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	666.450.000
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	55 LHP	90 Persen	219.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	219.200.000
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	89 LHR	90 Persen	482.100.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	482.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	49 LHR	90 Persen	205.212.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	205.212.000
6	01	02	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	70 Kesepakatan	90 Persen	1.307.116.281	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	1.307.116.281
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	170 Dokumen	90 Persen	311.521.824	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	311.521.824
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							501.287.326					501.287.326	
6	01	02	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		90 Persen	4 Laporan	90 Persen	168.811.326	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Persen	168.811.326
6	01	02	2,02	02	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		90 Persen	15 Laporan	90 Persen	332.47600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Persen	332.47600
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							408.606.432					408.606.432	
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi							408.606.432					720.000.000	
6	01	03	2,02	03	Koordinasi monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pendampingan dan Asistensi		90 Persen	4 Kegiatan	90 Persen	408.606.432	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	90 Persen	408.606.432

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD tahun 2023-2026, dan RKPD Tahun 2023 maka untuk pencapaian target kinerjanya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.4.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan berdasarkan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

A. Program yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
6																		
6	01										14.002.337.628				14.002.337.628			
6	01	01									9.900.843.765				9.900.843.765			
6	01	01	2,02								5.889.105.498				5.889.105.498			
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90 Persen	44 Orang / bulan	90 Persen	5.843.865.498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	5.843.865.498	
6	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90 Persen	12 Dokumen	90 Persen	45.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	45.240.000	
5	01	01	2,05									1.832.256.002				1.832.256.002		
6	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 Persen	2 Paket	90 Persen	87.690.000	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	87.690.000
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 Persen	40 Orang	90 Persen	1.744.566.002	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	1.744.566.002
6	01	01	2,06									695.448.832					695.448.832	
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	2 Paket	90 Persen	38.691.669	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	38.691.669

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	4 Paket	90 Persen	19.879.523	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	19.879.523
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	4 Dokumen	90 Persen	14.950.881	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	14.950.881
6	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	4 laporan	90 Persen	59.619.841	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	59.619.841
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 Persen	12 laporan	90 Persen	562.306.918	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	562.306.918
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.064.490.555					1.064.490.555	
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		90 Persen	46 unit	90 Persen	499.223.055	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	499.223.055
6	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Persentase Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		90 Persen	3 unit	90 Persen	565.267.500	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	565.267.500
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							229.831.872					229.831.872	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	12 bulan	90 Persen	40.831.872	Penerimaan Pembiayaan		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	40.831.872
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	12 Bulan	90 Persen	189.000.000	Pendapatan Asli Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	189.000.000
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							189.711.006				189.711.006		
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	6 unit	90 Persen	174.654.896	Pendapatan Bagi Hasil		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	174.654.896
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 Persen	21 unit	90 Persen	15.056.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	15.056.110
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan							3.692.887.431				3.692.887.431		
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							3.191.600.105				3.191.600.105		
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	20 LHP	90 Persen	666.450.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	666.450.000
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	55 LHP	90 Persen	219.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	219.200.000
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	89 LHR	90 Persen	482.100.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	482.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penyelenggaraan pengawasan Internal		90 Persen	49 LHR	90 Persen	205.212.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	205.212.000
6	01	02	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Internal		90 Persen	70 Kesepakatan	90 Persen	1.307.116.281	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	1.307.116.281
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyelenggaraan Internal		90 Persen	170 Dokumen	90 Persen	311.521.824	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal	90 Persen	311.521.824
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							501.287.326						501.287.326
6	01	02	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		90 Persen	4 Laporan	90 Persen	168.811.326	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Persen	168.811.326
6	01	02	2,02	02	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		90 Persen	15 Laporan	90 Persen	332.47600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksana Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90 Persen	332.47600
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							408.606.432						408.606.432
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi							408.606.432						720.000.000
6	01	03	2,02	03	Koordinasi monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pendampingan dan Asistensi		90 Persen	4 Kegiatan	90 Persen	408.606.432	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	90 Persen	408.606.432

BAB V **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum dan Inspektorat Daerah secara khusus maka Renja Inspektorat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selain menjadi dasar rencana pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Inspektorat Daerah, bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga diharapkan melalui program dan kegiatan di Inspektorat Daerah yang sudah disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dapat menunjang pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Daerah.

Guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Daerah. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow guna mewujudkan Bolaang Mongondow yang Hebat.

Lolak, Juli 2023

INSPEKTUR DAERAH



RIO A. LOMBONE, S.STP. MH, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 190307 199810 1 002